

## Pernyataan ANGOC tentang Perlindungan Hak Lahan dan Kepastian Kesejahteraan Pangan di Masa COVID-19

*Pandemi global COVID-19 telah mengungkap banyak kerentanan dan risiko mendasar kita sebagai manusia – ekonomi tak berperasaan dengan meluasnya ketidakadilan, kerusakan lingkungan, distribusi tanah yang tidak adil dan sumber daya alam untuk tempat tinggal dan mata pencaharian, meningkatnya polusi dan kota-kota yang padat, kurangnya akses kepada kebutuhan dasar, makanan dan nutrisi, dan tidak adanya system kesehatan universal, semua di tengah pertumbuhan planet kita bersamaan dengan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim.*

Sementara itu, penebangan hutan dalam skala besar, degradasi dan fragmentasi habitat alami, perdagangan spesies hewan dan tumbuhan, perubahan iklim antropogenik – di mana selanjutnya mendorong munculnya penyakit baru. Membuat lebih dari setengah pandemi global mengakibatkan penularan “zoonosis”, yaitu penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia, yang disebabkan oleh penebangan hutan untuk membuka lahan pertanian dan area komersial.

Ketika para ilmuwan dan ahli medis mencoba menemukan obat untuk COVID-19 dan vaksin untuk SARS-CoV-2, para ekonom, teknokrat, dan pemimpin politik telah memberikan tanggapan terhadap pandemik ini, sambil mulai bersiap untuk tatanan "normal baru". Sejak Maret tahun ini, pemerintah berupaya keras untuk menangani masalah pandemi ini terutama melalui tindakan pembatasan jarak fisik, pembatasan perjalanan, jam malam, penguncian dan karantina komunitas.

*Sebelumnya COVID-19 adalah krisis kesehatan, saat ini pandemi dengan cepat berkembang menjadi krisis kemiskinan, kelaparan, dan kekurangan gizi yang membebani pekerja sector pertanian, orang-orang yang tidak memiliki lahan, dan kaum miskin perkotaan.*

Bahkan sebelum wabah COVID-19, diperkirakan 821 juta orang di seluruh dunia sudah mengalami kekurangan gizi pada tahun 2018, dengan mayoritas orang kelaparan di dunia tinggal di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana 12,9% populasinya kekurangan gizi.<sup>1</sup>

Sistem pangan saat ini secara langsung dipengaruhi oleh pandemi melalui gangguan pada rantai pasokan dan pasar pangan. Pada saat yang sama, kapasitas produksi dan distribusi pangan terhambat akibat hilangnya lapangan kerja dan penurunan daya beli, terutama bagi mereka yang miskin dan rentan.

*Tanpa akses kepada tanah, pasar, dan sarana dan prasarana, mereka yang bermata pencaharian petani menjadi semakin tidak aman masa depannya.* Produsen makanan yang juga mengandalkan pekerjaan non-pertanian (non-farm) dan di luar pertanian (off-farm) demi mendukung mata pencaharian mereka dibatasi dalam kemampuan mereka untuk melakukan perjalanan ke tempat kerja mereka. Penguncian atau karantina wilayah (Lockdown) nasional dan pembatasan perdagangan dan perjalanan telah mengganggu rantai makanan, yang pada gilirannya telah melumpuhkan mata pencaharian petani kecil di seluruh Asia, di mana sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi sebagian besar negara.

---

<sup>1</sup> According to the “State of food security and nutrition in the world (SOFI)” (FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO, 2019). See <https://www.wfp.org/publications/2019-state-food-security-and-nutrition-world-sofi-safeguarding-against-economic#:~:text=About%20the%20series%3A%20The%20State,challenges%20for%20achieving%20this%20goal>

*Ketika pemerintah meminta orang untuk tinggal di rumah dalam rangka mencegah penyebaran virus, kebutuhan akan lahan yang aman dan kepemilikan perumahan menjadi penting bagi semua orang, jauh daripada sebelumnya.* Dengan pembatasan transportasi, pekerja upah harian dan pekerja sektor informal kehilangan pendapatan mereka, dan banyak yang terpaksa meninggalkan rumahnya karena kurangnya kepemilikan secara legal dan ketidakmampuan untuk membayar uang sewa.

Yang paling rentan adalah para tunawisma dan pekerja migran yang kehilangan pekerjaan di kota, terpaksa kembali ke daerah asalnya, banyak yang berjalan ratusan kilometer hanya untuk bersama keluarga mereka. Di India, merupakan karantina wilayah (lockdown) terbesar dalam sejarah 1,3 miliar orang, yang telah menyebabkan jutaan pekerja migran menganggur dan terdampar di kota-kota besar, yang memaksa mereka melakukan perjalanan panjang dan berisiko untuk kembali ke desa terpencil mereka.

*Termasuk di antaranya yang paling terdampak adalah masyarakat miskin di perkotaan* – mereka yang hidup tanpa jaminan kepemilikan, dalam kondisi perumahan yang buruk, di dalam ruangan sempit dengan ventilasi dan sanitasi yang tidak memadai, yang berisiko mengalami stigma dan diusir oleh masyarakat asli ketika wabah kesehatan terjadi. Mereka juga memiliki akses yang sulit untuk perawatan kesehatan, dan kurangnya jaminan kerja membuat mereka lebih rentan terhadap lonjakan harga pangan. Serta tidak adanya makanan bergizi yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap infeksi dan morbiditas.

*Kelompok yang rentan seperti masyarakat miskin, lanjut usia, perempuan, dan anak-anak tidak hanya menghadapi risiko lebih besar tertular virus, serta sektor tertentu juga kurang mendapat perhatian.* Persaingan dalam pemerintah dalam hal prioritas sumber daya dapat menyebabkan ketegangan antara perawatan kesehatan dan prioritas ketahanan pangan jangka panjang. Di India, lebih dari 120 juta anak kehilangan kesempatan makan siang di sekolah mereka, sebagai sebab dari penutupan sekolah karena COVID-19. Insiden kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat karena wanita dan anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, dengan akses yang lebih sedikit ke sarana dalam mencari bantuan karena protokol karantina yang ketat diberlakukan.

Sudah ada prediksi kelam bahwa kejatuhan ekonomi akibat pandemi global bahkan dapat meningkatkan kemiskinan global sebanyak setengah miliar orang, atau delapan persen dari total populasi manusia, yang menandai pertama kalinya kemiskinan meningkat secara global dalam tiga dekade, sejak tahun 1990.

*Pemerintah telah menetapkan program ameliorasi sosial jangka pendek, jaring pengaman bagi orang miskin, dan dana talangan dari perusahaan. Namun, kecuali ada perombakan drastis dalam model pembangunan yang menempatkan orang dan komunitas sebagai perhatian, upaya ini hanya akan mengembalikan kita ke "bisnis layaknya biasanya (business as usual)"* dan program tanggap COVID-19 ini akan menjadi "perhatian bulan ini" bagi para aktor pemberi bantuan pembangunan dan donor.

*Meskipun program distribusi makanan dan uang tunai ini dapat segera mengurangi kelaparan, program tersebut tidak dimaksudkan untuk mengatasi penyebab dasarnya.* Pertanyaan utama tentang program jaring pengaman ini adalah apakah program ini merupakan program berkelanjutan untuk jangka panjang, dan apakah program tersebut akan memberdayakan orang miskin dalam usaha keluar dari kemiskinan yang kronis, kelaparan dan kekurangan gizi. Negara-negara berkembang dengan anggaran ketat telah beralih ke pinjaman luar negeri, sehingga menyebabkan meningkatnya hutang nasional yang harus ditanggung oleh anak-anak kita. Lebih lanjut, terdapat laporan korupsi dalam pelaksanaan program penanggulangan COVID.

*Ketika prioritas pemerintah sedang bergeser, terdapat laporan bahwa ada individu dan kelompok yang berusaha memanfaatkan situasi melalui penembangan liar, penambangan liar, dan perampasan lahan.*

Di Filipina, setidaknya terjadi empat kegiatan penambangan ilegal telah dimulai sejak karantina wilayah dimulai Maret lalu.<sup>2</sup>

*Petani kecil di seluruh Asia tetap berada di garis depan selama pandemi ini, dengan terus menjadi pemasok utama beras, biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran, dan makanan laut, namun petani dan produsen kecil, pengrajin pedesaan, serta masyarakat adat terus kehilangan akses dan kontrol atas sumber daya produktif (yaitu, tanah, air, hutan dan garis pantai) yang mereka andalkan sebagai mata pencaharian.*

Meningkatnya kendali perusahaan atas industri makanan semakin memperparah situasi bagi petani kecil di Asia di saat mereka menghadapi lapisan hambatan baru - kesulitan dalam mengakses layanan, kredit dan pasar, layanan penyuluhan yang lemah, dan kebijakan harga yang merugikan petani kecil. Proses keterasingan petani dari rantai nilai ini diperburuk dengan serangan pandemi COVID-19.

*Politisi dan pemimpin negara juga memanfaatkan pandemi untuk melakukan konsolidasi kekuasaan mereka.* Di sejumlah negara Asia, bagi warga sipil dan aktivis sosial menunjukkan contoh-contoh mengkhawatirkan yang mencerminkan militerisasi negara yang meningkat dan pengawasan secara agresif; tindakan keras pemerintah terhadap perbedaan pendapat, media dan kebebasan berbicara. Di Filipina, pembangkang dan aktivis dicap sebagai teroris di bawah undang-undang keamanan baru yang telah diberlakukan untuk membungkam penentangan terhadap pemerintah. Undang-undang semacam itu diundangkan di tengah pandemi, tanpa adanya pengawasan dan perdebatan public.

*Saat ini, jika Covid-19 telah mengajarkan kita sesuatu, yaitu kita perlu membangun kembali sistem kekebalan kita tidak hanya sebagai individu, tetapi juga secara kolektif sebagai masyarakat.*

Dunia akan terus berjuang melawan krisis serupa, tetapi kita harus bekerja sama untuk memastikan hasil terbaik demi generasi yang akan datang. Kita harus membangun masyarakat di mana anak-anak kita dapat tumbuh dengan penuh rasa semangat, masa depan di mana mereka akan berkembang dengan baik. Yang seharusnya tidak ada kembali ke "normal lama" - status quo dan bisnis yang normal seperti biasanya. Sebaliknya, masyarakat dan komunitas perlu pulih dan membangun kembali untuk menjadi lebih baik. Seperti yang dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, "[Kita harus membangun] ekonomi dan masyarakat yang lebih setara, inklusif dan berkelanjutan yang lebih tangguh dalam menghadapi pandemi, perubahan iklim, dan menghadapi banyaknya tantangan global lainnya yang kita hadapi."<sup>3</sup>

*Kerangka pembangunan harus ditransformasikan menjadi kerangka kerja yang mengutamakan manusia dan lingkungan.* Akses dan kendali terhadap lahan dan sumber daya alam harus berada di tangan produsen kecil - dukungan pemerintah yang memadai harus tersedia dalam memastikan bahwa mereka mampu memproduksi secara stabil makanan yang cukup, aman, dan bergizi, sehingga dapat mudah diakses dan terjangkau. Peran masyarakat adat dan pengendali hutan dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati harus diakui, demi mencegah munculnya dan penyebaran penyakit baru. Selain itu, hanya kondisi ekonomi stabil, upah yang adil, dan perawatan kesehatan publik yang komprehensif harus diprioritaskan, dalam memastikan bahwa masyarakat dan infrastruktur negara dapat menahan guncangan tiba-tiba yang disebabkan oleh krisis seperti halnya pandemi saat ini.

---

<sup>2</sup> As shared by Alyansa Tigil Mina during the Webinar on "COVID-19 in the Age of Extractivism and Climate Change - Voices From the South," 22 April 2020, organized by Peoples Dialogue.

<sup>3</sup> Shared responsibility, global solidarity: Responding to the socio-economic impacts of COVID-19 (March 2020). See [https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg\\_report\\_socio-economic\\_impact\\_of\\_covid19.pdf](https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf)

Kita perlu memikirkan kembali pola pikir kita jika ingin memastikan kesejahteraan makanan bagi semua. Tidaklah cukup hanya Negara yang memfokuskan perhatiannya pada rantai nilai global dan nasional. Sebagai bentuk strategi sistem pangan secara keseluruhan, Pemerintah perlu memberikan dukungan secara khusus serta penguatan sistem pangan lokal dan produsen pangan skala kecil untuk memastikan kesejahteraan pangan bagi semua.

Prinsip kerja secara fundamental dalam rangka membangun kesejahteraan pangan yang langgeng yaitu dengan mengurangi jarak tempuh pangan, atau “mengurangi jarak antara tempat makanan diproduksi, dan tempat dimana makanan tersebut dikonsumsi” – sejauh mungkin.<sup>4</sup> Kita membutuhkan pergeseran ke arah berinvestasi di masyarakat- dengan mengacu pada sistem ketahanan dan sistem respons yang terpadu.

***Pendekatan ini harus menjamin hak produsen kecil atas lahan dan sumber daya.*** Kita harus fokus pada pengembangan pasar lokal di mana produsen kecil memiliki akses langsung, dan juga di mana mereka dapat menerima harga yang pantas untuk produk mereka. Hal ini akan dapat membantu membangun hubungan yang baik secara langsung dan akuntabilitas antara produsen dan konsumen, yang membuat mereka akan dapat menyediakan produk yang segar, serta akan mengurangi emisi karbon terkait dengan pengangkutan makanan dalam jarak yang jauh.

***Pembaruan agraria dan jaminan kepemilikan lahan harus menjadi bagian keseluruhan (integral) dalam strategi pembangunan nasional.*** Kemandirian ketahanan dan pembangunan pangan secara berkelanjutan di Asia hanya akan dapat tercapai dengan redistribusi lahan yang lebih adil, bersamaan dengan layanan dukungan yang memadai, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat.

Lahan merupakan hal yang lebih dari sekedar aset ekonomi atau komoditas. Dikarenakan lahan tidak hanya menjadi sumber kelangsungan hidup tetapi juga mampu meningkatkan martabat dan rasa aman bagi manusia serta kesempatan untuk keluar dari jurang kelaparan dan kemiskinan. Dengan adanya akses yang lebih adil terhadap lahan, hal ini dapat mengurangi konflik sumber daya dan migrasi keluar dari pedesaan, serta meningkatkan perdamaian secara keseluruhan demi stabilitas ekonomi dan politik yang lebih baik.

***Produsen kecil harus memiliki kepemilikan dan kendali atas lahan mereka; dan hak masyarakat adat atas tanah mereka, termasuk sistem tata kelola tanah tradisional mereka harus diakui. Ini adalah langkah-langkah penting dalam rangka mengurangi konflik dan memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.***

***Bersamaan dengan kepastian dalam jaminan kepemilikan (tenure security) yang merupakan kebutuhan dalam pertanian yang terdiversifikasi dan berkelanjutan sebagai dasar pertanian rakyat.*** Dimana sepanjang sejarah, petani dan produsen kecil telah menjadi tulang punggung pertanian dan ketahanan pangan Asia. Asia adalah rumah bagi 75% rumah tangga pertanian dunia, 80% di antaranya adalah petani dan produsen skala kecil.

***Harus ada pergeseran yang nyata dari industri pertanian berbasis pasar kepada sistem pertanian agroekologi berbasis masyarakat dalam rangka membangun daya tahan dengan menggunakan pupuk alami dan input lokal*** – dalam meregenerasi tanah, menyuburkan tanaman, dan melawan hama. Sistem pertanian agroekologis tidak terlalu bergantung pada pupuk luar dan pestisida dari luar, sehingga mengurangi kerentanan petani terhadap guncangan dan fluktuasi harga yang tiba-tiba. Sistem agroekologi juga menekankan rantai pasokan yang lebih pendek dan pasar teritorial lokal.

---

<sup>4</sup> Bangkok Declaration (April 1996). Drafted and signed by some 101 CSOs from Asia-Pacific, the statement analyzed and recommended priority areas for action as input to the World Food Summit (WFS)

## Seruan untuk Bertindak

Pandemi menyerukan tindakan yang cepat dan aksi kebersamaan bagi komunitas internasional, pemerintah, dan rakyat.

### *Respon cepat global*

- Kami mendukung seruan global untuk "**Vaksin Penderita COVID 19**" yang aman dan efektif, setelah dikembangkan, harus diproduksi secara luas dan dapat diakses secara universal untuk semua negara dan orang, secara gratis<sup>5</sup> dan tidak terhalang oleh rezim hak kekayaan intelektual.
- Kami bergabung dengan banyak negara dan kelompok dalam seruan untuk gencatan senjata segera dalam konflik bersenjata aktif di semua bagian dunia, dan fokus pada perang melawan pandemi COVID-19. Negara harus memastikan bahwa tindakan mereka peka terhadap konflik, non-diskriminatif, dan selaras dengan hukum dan standar hak asasi manusia internasional serta peka terhadap golongan masyarakat yang rentan terkena dampak konflik, pengungsi, pengungsi internal (IDPs), penyandang disabilitas, wanita, anak-anak, dan orang tua.
- Saat paket stimulus diluncurkan, kami menyerukan penghapusan hutang secara mendesak dan pembatalan hutang bagi negara-negara berkembang yang miskin terutama mereka yang sedang mengalami konflik internal.
- Pada bulan Desember 2019, markas besar PBB mengumumkan penyelenggaraan KTT Sistem Pangan pada tahun 2021 dengan tujuan untuk memaksimalkan manfaat dari pendekatan sistem pangan dalam seluruh Agenda SDGs 2030, dalam rangka memenuhi tantangan perubahan iklim, menciptakan sistem pangan secara inklusif, dan mendukung perdamaian yang berkelanjutan. Namun, hal tersebut akan menjadi tidak berarti kecuali ada partisipasi yang berarti dan suara yang efektif dari organisasi produsen pangan skala kecil dan organisasi masyarakat sipil lainnya yang peduli dengan pangan, KTT ini bisa menjadi latihan yang tidak berarti.

### *Tindakan serta tanggapan cepat Negara*

- Lebih dari sekedar program bantuan pangan dan pemulihan ekonomi, tata kelola pertanian dan sistem pangan harus direstrukturisasi dan ditransformasikan sehingga kebijakan dan program secara langsung menanggapi kebutuhan petani dan produsen kecil, masyarakat adat, dan kaum miskin kota.
- Pemerintah harus mengubah prioritas, meningkatkan anggaran nasional untuk mengatasi dampak dari pandemi, terutama pada orang miskin. Korupsi harus dihentikan untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan efektif. Mekanisme pemantauan dengan partisipasi masyarakat sipil dan pemeliharaan kemandirian media harus dibangun untuk

---

<sup>5</sup> See GCAP Asia statement, May 2020

memastikan transparansi program tersebut tepat sasaran.

- Mengingat menyusutnya ruang demokrasi, yang semakin diperbesar selama pandemi ini, hak-hak organisasi masyarakat sipil, pembela hak atas tanah dan hak asasi manusia, serta media harus dihormati dan dilindungi.
- Melindungi dan memastikan keselamatan petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, dan orang lain yang terlibat dalam produksi, penanganan, dan pemrosesan pangan untuk membantu menghindari penangkapan dan penyebaran COVID-19.
- Mengakui peran khusus wanita dalam sistem kesehatan dan pangan, sebagai produsen makanan, pengolah dan pekerja perawat. Maka hal tersebut dapat mempromosikan solidaritas antar masyarakat dan komunitas sebagai prioritas untuk terus memberdayakan dan mendukung semua orang untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam rangka menghadapi tantangan yang muncul.
- Menyediakan dan memastikan mekanisme perlindungan sosial untuk orang-orang termiskin dan paling rentan selama dan setelah krisis COVID-19. Menjamin Hak atas Kesejahteraan Pangan untuk Semua, dalam jumlah dan kualitas gizi yang cukup.
- Memberikan bantuan kepada para migran yang kembali dari luar negeri dan daerah perkotaan ke pedesaan. Pengujian dan pelacakan kontak aktif meskipun harus dilakukan untuk memastikan keamanan semua.

#### *Tindakan cepat untuk masyarakat sipil, komunitas, dan masyarakat*

- Dengan tidak adanya dukungan pemerintah atau kemanusiaan, komunitas dan CSO memainkan peran penting selama krisis ini. Karenanya, kami mendorong CSO untuk terus memantau aktivitas respons COVID 19 Pemerintah dan mempertahankan kerja advokasi mereka. CSO harus terus bekerja sama, dengan melibatkan dengan petani dan nelayan, pekerja sektor informal, kelompok marjinal dan rentan, masyarakat petugas kesehatan, masyarakat adat, pemuda dan kelompok perempuan, untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi dan suara-suara terdengar.
- Sementara pemerintah dan pelaku kemanusiaan memfokuskan upaya mereka pada prioritas baru dan lebih mendesak, kami CSO harus tetap waspada terhadap pelaku Negara dan kepentingan bisnis yang menggunakan keadaan pandemi ini untuk menggunakan kendali mereka atas lahan, hutan dan sumber daya alam, tanpa memperhatikan standar hak asasi manusia. Kami akan terus memantau kasus-kasus konflik lahan, terutama kasus-kasus perampasan tanah yang terjadi.

- Kami mendorong CSO untuk melawan informasi yang salah, prasangka, dan diskriminasi yang berkembang di komunitas kami dan di media sosial terhadap orang dan individu yang berdasarkan ras, etnis, kebangsaan, gender dan seksualitas, agama, kasta, dan kelas sosial - yang telah diperburuk oleh pandemi saat ini. Ketika infeksi virus atau penyakit menyebar, sasaran yang mudah disalahkan biasanya adalah orang-orang yang memiliki ras; kelompok minoritas dan adat; orang-orang pengungsi, imigran atau migran; orang yang miskin; dan bahkan petugas kesehatan. Kita semua harus berdiri dan menghadapi rasisme, prasangka, dan diskriminasi ketika itu terjadi.
- OMS perlu mulai secara kolektif berdiskusi dan merencanakan dengan masyarakat untuk solusi jangka panjang guna mendukung pemulihan, memperkuat kesiapsiagaan, mengejar ketahanan pangan dan swasembada, membangun ketahanan lokal, dan mempromosikan pembangunan sosio-ekonomi yang berkelanjutan untuk semua. Masyarakat sipil juga harus melibatkan kelompok politik dan bisnis untuk merumuskan rencana penggunaan dan pembangunan yang menyeluruh, partisipatif, dan tahan iklim, dengan tujuan untuk mendukung mata pencaharian lokal dan mempromosikan kesejahteraan pangan.

### Langkah Kedepan

Sungguhpun kita menghadapi keadaan yang sulit, masyarakat sipil tidak hanya diam saja dan tetap bertindak. Tidak terpengaruh oleh kesulitan logistik, yang dialami banyak komunitas selama pandemi ini dimana memang telah menghidupkan kembali semangat kesukarelaan, kerja kemanusiaan dan aksi sipil di antara kelompok, keluarga dan individu, sebagian besar terutama di kalangan kaum muda. Aksi warga negara harus didukung, dibimbing dan dipertahankan, sehingga mereka menjadi kekuatan yang benar-benar transformatif dalam masyarakat terutama di kalangan pemuda. Tindakan warga negara ini harus didukung, dibimbing, dan dipertahankan, sehingga menjadi kekuatan yang benar-benar transformatif dalam masyarakat.

Untuk bagian kami, ANGO C akan terus bekerja di dalam dan di luar jaringannya untuk memfasilitasi pertukaran pengalaman, pelajaran, dan rekomendasi berbasis bukti bagi para pemangku kepentingan, saat kami melewati masa-masa yang tidak pasti ini. Kami akan terus berusaha untuk mengamankan kesejahteraan pangan dan

### **Komitmen ANGO C yang berkelanjutan menuju pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat**

*Makanan dan kebebasan  
Pekerjaan dan keadilan  
Lahan dan tenaga kerja  
Kedamaian dan kemakmuran*

Makanan adalah hak asasi manusia secara mendasar, tetapi tidak ada artinya tanpa kebebasan. Tema kebebasan mengingatkan kita bahwa sebagian besar upaya kita saat ini harus berpusat tidak hanya pada kebebasan politik dan penting juga pada kebebasan dan peluang ekonomi.

Bersama-sama, makanan dan kebebasan adalah hak paling dasar dari masyarakat Asia - bahkan bagi masyarakat mana pun.

Ada nilai kebebasan Asia yang khas - etika bertahan hidup untuk semua, bergerak dari kemiskinan bersama di masa lalu menuju kemakmuran bersama di masa depan. Keadilanlah merupakan dasar komunitas, prihatin tentang dampak liberalisasi perdagangan dunia dan globalisasi.

Globalisasi juga telah memacu penurunan secara cepat dari sumber daya tanah dan air Asia yang luas dan beragam. Oleh karena itu, LSM Asia - peserta yang semakin aktif dalam gerakan lingkungan - harus terus mengungkapkan kepedulian universal terhadap keharmonisan ekologi.

Banyak petani Asia terus mengolah lahan yang tidak mereka miliki; struktur agraria yang ada masih terperosok dalam kerja paksa. Oleh karena itu, reformasi agraria yang meluas perlu memanfaatkan tanah dan tenaga kerja untuk kepentingan semua orang.

Terakhir, di era perang liberalisasi dan konflik etnis ini, kita diingatkan akan perlunya amnesti dengan kehormatan, dan perdamaian dengan martabat. Karena tidak ada kedamaian tanpa pembangunan, maka tidak ada kemakmuran tanpa kedamaian.

kebebasan, pekerjaan dan keadilan, lahan dan tenaga kerja, perdamaian dan kemakmuran untuk generasi sekarang dan selanjutnya.

Jaringan ANGOC dan mitranya telah lama mengadvokasi kesejahteraan pangan dalam kerangka kerja pertanian, didukung oleh sistem pertanian ekologis untuk produksi pangan. Kontrol demokrasi atas sistem pangan adalah ujian terakhir demokrasi. Kesejahteraan pangan tidak dapat dijamin dengan mempercayakan pertanian, produksi pangan dan perdagangan ke pasar global.

Sebagai langkah maju, jaringan ANGOC akan menghasilkan informasi yang solid dan berbasis komunitas untuk menilai ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan komunitas sebagai dasar perencanaan dan tindakan di tingkat komunitas dan menghubungkan inisiatif berbasis desa ini dengan advokasi kebijakan di tingkat nasional dan level regional.

Kami akan memfasilitasi pendirian pusat makanan lokal untuk memperpendek jarak antara produsen makanan kecil dan konsumen.

Terakhir, kami mengajak CSO dan jaringan lainnya untuk meningkatkan, menyebarkan pernyataan ini dan membangun dialog untuk melanjutkan wacana dan belajar dari satu sama lain, saat kami bekerja sama dalam membangun hari esok yang tangguh dan penuh kasih. □

#### **Tertanda:**

Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC)  
Association for Land Reform and Development (ALRD)  
Association of Voluntary Agencies in Rural Development (AVARD)  
Community Development Assistance (CDA)  
Community Self-Reliance Centre (CSRC)  
Ekta Parishad (EP)  
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)  
NGO Federation of Nepal (NFN)  
Philippine Partnership for the Development of Human Resources in Rural Areas (PhilDHRRRA)  
Sarvodaya Shramadana Movement (SARVODAYA)  
South Asia Rural Reconstruction Association (SARRA)  
STAR Kampuchea (SK)

8 September 2020

For those interested in signing on to this Statement in the spirit of solidarity, kindly inform the ANGOC Regional Secretariat at [angoc@angoc.org](mailto:angoc@angoc.org).

Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC)  
33 Mapagsanguni Street, Sikatuna Village, Diliman  
1101 Quezon City, Philippines  
[angoc@angoc.org](mailto:angoc@angoc.org)  
+63 2 83510581  
+63 2 83510011

